

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**



**URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU
TERHADAP PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN SUMENEP**

Oleh

**Drs. Hasan Basri, M.Si
Moh. Ikmal, M.Sos**

**0020126101 (ketua pelaksana)
0706068607 (anggota pelaksana)**

**STKIP PGRI SUMENEP
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA

Peneliti
Nama lengkap **Drs. Hasan Basri, M.Pd**
Perguruan tinggi STKIP PGRI Sumenep
NIDN 0020126101
Jabatan fungsional Lektor/ IIIb
Program Studi PPKn
Nomor HP
Alamat surel hasanbasri@stkipgrisumenep.ac.id

Anggota(I)
Nama lengkap **Moh. Ikmal, M.Sos**
NIDN 0706068607
Perguruan tinggi STKIP PGRI Sumenep

Institusi Mitra
Nama Institusi Mitra MAN Sumenep
Alamat mitra Desa Pangarangan Sumenep
Penanggungjawab
Tahun Pelaksanaan tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya tahun berjalan Rp. 7.000.000
Biaya keseluruhan Rp. 7.000.000

Sumenep, 20 Mei 2022

Ketua Pelaksana

Drs. Hasan Basri, M.Si
NIDN. 0020126101



Mengetahui,
Ketua STKIP PGRI Sumenep

Dr. Asmoni, M.Pd
NIK. 07731015



Kepala LPPM
STKIP PGRI Sumenep

Mulyadi, M.Pd
NIK. 07731135

RINGKASAN

Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu yang dihadapi pemuda Kabupaten Sumenep sebagai pemilih pemula dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula melatarbelakangi Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Untuk memecahkan persoalan tersebut perlu dilakukan Pendidikan Politik dan penyuluhan pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran serta minat menggunakan hak pilih dalam pemilu yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, pendampingan dan pembelajaran bagi Pemuda Kabupaten Sumenep. Pada program penyuluhan ini kami ingin memberikan materi yang meliputi Undang- undang Pemilu No 7 Tahun 2017, Bonus Demografi, Demokrasi dan Partai politik, Pemilu sebagai dan Kekuasaan, dan Peran Partisipasi Pemilih Pemula dalam pemilu. Target dari Penyuluhan ini pertama diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Pemilih pemula, kedua Pemuda dapat memiliki tambahan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran tentang Demokrasi dan berpartisipasi aktif memberikan hak pilihnya pada pemilu. Kesimpulan, Urgensi penyuluhan Pemilu sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula serta dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang pentingnya pembelajaran pemilu bagi pemula

Kata kunci: Pendidikan Politik , Pemilu; Pemilih Pemula

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Peran generasi muda dalam perhelatan pemilu tentu sangat menentukan arah demokrasi dan kemajuan bangsa. Dewasa ini, pembahasan khususnya para pihak pemangku (*stakeholder*) tidak bisa lepas dari fenomena pemilih pemula. Penjelasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum, pada Bab I, Pasal 1, angka 16 berbunyi bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Dalam hal ini tentu potensi pemilih pemula sangatlah besar. Peran generasi muda dalam menentukan arah perjalanan demokrasi bangsa sangatlah menentukan, Demokrasi adalah kosakata yang sangat penting dalam khasanah ketatanegaraan. Ini di sebabkan oleh pandangan yang saat ini diterima secara universal, bahwa demokrasi merupakan nama yang paling baik bagi sistem politik dan sosial suatu Negara (Setiawan, 2017).Kaitannya dengan pemuda desa gadingsari, Secara umum kondisi fisik Kabupaten Sumenepmemiliki kesamaan dengan desa – desa lain di wilayah kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sumenepmerupakan daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni, dimana di desa ini tingkat pendidikan masih sangat rendah. Ditinjau secara klimatologis Kabupaten Sumenepmerupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Kabupaten Sumenepberikut adalah data terakhir mengenai kondisi fisik berdasarkan data statistik.

a. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Petung
- Sebelah Selatan : Desa Ardisaeng
- Sebelah Timur : Desa Pakem
- Sebelah Barat : Desa Kupang



Dalam Pandangan Schumpetrian (Liando, Vol 3 No 2 Oktober 2016) Schumpetrian, Pemilu merupakan sebuah arena yang mawadahi kompetisi (kontestasi) dengan keterlibatan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihannya. Dalam hal keikutsertaan dalam kontestasi pemilu, pemuda Kabupaten Sumeneptergolong minim, pemuda disana menganggap pesta demokrasi tersebut tidak begitu penting, kecuali pesta demokrasi desa (Pilkades), oleh karena itu adanya program Penyuluhan dan sosialisasi pemilu bagi pemuda di Kabupaten Sumenepini merupakan kewajiban, karena merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Demi menjamin persamaan dan keadilan warga negara dalam menggunakan hak politiknya menjadikan pemilih harus dipastikan terlebih dahulu bahwa setiap warga negara telah diakomodir secara keseluruhan tanpa terkecualikan (Zainal Arifin Hoesein., 2017).

Menurut Schumpeter Demokrasi Bermakna adanya Kesempatan bagi rakyat untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan memerintah mereka melalui Pemilihan Umum. Di dalam Sosialisasi Penyuluhan Pemilu ini terdapat pendidikan pemilih yang mutlak perlu disampaikan (M. Taufik., 2007). Dengan tujuan demi suksesnya penyelenggaraan pemilu secara umum, juga merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat dan pemuda tentang *urgennya* pemilu (Kuswati, 2019). Kelak proses demokratisasi akan di teruskan oleh generasi muda ini. Oleh karenanya, jika pemilih pemula dibekali pengetahuan pemilu, pendidikan politik mulai detik ini, diharapkan kelak para generasi muda akan menjadi pelopor pemilih pemula yang dapat menentukan transformasi kepemimpinan masa depan. Sebagaimana di jelaskan Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2018 (Umum, 2018). bahwa "Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu". Menurut Arbi Sanit (Sanit, 1985). "bahwa anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau partisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama di bidang politik"

Selanjutnya, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), Pendidikan Politik sosialisasi dan penyuluhan ini sasaran yang dituju adalah kelompok pemuda berbasis pemilih pemula khususnya Pemuda. Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mitra, kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan Pemilu, Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumenep.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target pengabdian pada masyarakat ini adalah terciptanya kesadaran dan partisipasi pemilih pada Kelompok pemilih pemula di kecamatan kota Kabupaten Sumenep. Keseluruhan mitra pengabdian merupakan kelompok masyarakat yang kreatif dan inovatif serta jeli melihat besarnya peluang usaha

B. Luaran

Sosialisasi, pelatihan sekaligus pendampingan yang dilakukan bagi mitra diharapkan mampu memberikan pemahaman, peningkatan kesadaran akan pentingnya pengetahuan politik.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh tim KKN yang terdiri dari satu orang dosen dan Lima orang mahasiswa semester VI Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid. Dalam pelaksanaan Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan Metode pelaksanaan mencakup dua bagian pokok, yaitu metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), dan kedua metode penyuluhan Pemilu bagi pemilih pemula pemuda desa gadingsari.

1. Metode Pelaksanaan PKM dan KKN.

a. Identifikasi Masalah

Tim KKN melakukan Surve lapangan untuk Mengidentifikasi atau mencari pokok permasalahan, yang terjadi di Kabupaten Sumenepyang berkaitan dengan pemuda dalam hal tentang pengetahuan pemilih pemula berkenaan sejauh mana pemahaman mereka terhadap pemilu dan demokrasi. Kesadaran serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan tingginya angka golput dalam berpartisipasi dalam pemil. Pemilih ini cenderung hanya menjadikan pemilu sebagai formalitas belaka atau penggugur kewajiabn saja, hal ini bisa jadi karena kurangnya informasi tentang pentingnya pemilu dan kurang menariknya figure pemimpin yang akan dipilih (Labolo, 2017). Dengan memperhatikan persoalan kebangsaan, kemudian ditarik kedalam wilayah kajian persoalan di Kabupaten Sumenep, Peningkatan pengetahuan terhadap pengetahuan pemilu dan sistem pembelajaran politik guna memudahkan penyampaian infomasi pengetahuan. Maka setelah di dapat pokok permasalahannya kami berinisiatif mencari jalan pemecahannya, yaitu dengan melalui penyuluhan Pemilu Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sumenep

b. Menyusun Materi

Dengan menyimpulkan hasil turun lapangan dan study kepustakaan, tim KKN akan melakukan penyusun materi penyuluhan pemilu berkenaan dengan Penyuluhan Pemilu bagi pemilih pemula diKabupaten Sumenep. Adapun materi disusun sebagai berikut:

1. Penyampaian Undang – Undang No 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No 10 Tahun 2018
2. Sistem Demokrasi di Indonesia dan Politik Kekuasaan
3. Pemilu sebagai implementasi sistem Demokrasi
4. PartisipasiMasyarakat dalam Pemilu.

2. Metode Pelaksanaan Penyuluhan Pemilu

Metode pelaksanaan kegiatan inti dari KKN ini, yaitu penyuluhan Pemilu bagi pemilih pemula yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu yang akan datang serta tujuan lainnya adalah gunu meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang pemilu. Secara garis besar, tujuan dari kegiatan ini agar pemuda di Kabupaten Sumenepmenjadi pemilih pemula yang dapat memahami pentingnya berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. Untuk merealisasikan acara tersebut, dirancang kegiatan melalui tahap- tahap sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Dalam tahapan persiapan kegiatan penyuluhan, tim KKN melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah Desa, RT / RW atau kepala dusun setempat. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan konsep kegiatan, permohonan izin pelaksanaan kegiatan pengabdian, dan penentuan jadwal kegiatan, sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak Desa Gadingsari.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan penyuluhan Kegiatan pengabdian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 tahap pelaksanaan :1) Sosialisasi Penyuluhan Pemilu (dalam bentuk kegiatan pemberian materi. 2) pendampingan penyuluhan dalam bentuk kegiatan (pengenalan alat peraga pemilu). Selanjutnya setelah diperoleh ijin, tim PKM atau KKN menetapkan waktu, mempersiapkan tempat beserta fasilitas yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan.

A. Paritipasi Mitra

Bahwa dalam Program kegiatan penyuluhan pemilu ini diharapkan Peserta KKN bersama dengan Desa dapat mendorong dalam arti kelompok pemuda (pemilih pemula) mengerti dan paham akan pentingnya pemilu. Dengan demikian, diadakannya kegiatan penyuluhan para pemuda Kabupaten Sumenep menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak ikut terlibat dalam perayaan pesta demokrasi. Kaitannya dengan pemilihan umum, para pemilih pemula diharapkan memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan mampu menentukan pilihan yang rasional dan cerdas demi kemajuan bangsa dan negara.

B. Pembagian Peran

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tim KKN ini terdiri dari satu orang dosen dan empat orang mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid. Pembagian tugas pada tim KKN ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Dosen memberikan arahan dalam kegiatan KKN yang akan dilaksanakan, khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Menjelaskan tahapan pelaksanaan yang akan digunakan selama kegiatan pengabdian, memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendampingan. Dosen mengantarkan dan melakukan serah terima mahasiswa KKN ke pihak mitra. Selain itu, dosen juga bertugas untuk menyusun proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat, serta menulis jurnal sebagai luaran wajib KKN yang dilaksanakan.

Kedua, Mahasiswa mendapat tugas mencari lokasi atau tempat yang akan dijadikan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), mengumpulkan informasi tentang mitra, melaksanakan kegiatan pengabdian yang berupa pendampingan penyuluhan Pemilu, mengumpulkan data selama kegiatan pengabdian, serta membantu dosen dalam hal penulisan laporan akhir dan jurnal pengabdian. Dosen dan mahasiswa bersama-sama menentukan tema dan judul pengabdian yang akan dilaksanakan.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

1. Kualifikasi tim pelaksana kegiatan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP PGRI Sumenep memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai pusat layanan yang dimilikinya, antara lain Pusat Studi Kebijakan, Pusat Layanan KKN dan KKL, dan Pusat Layanan Kewirausahaan dan Konsultasi karir. Jumlah kegiatan LPPM dosen STKIP PGRI Sumenep dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, LPPM telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian dengan memberdayakan potensi stakeholder dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data base LPPM tahun 2011, terdapat 57 kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan baik dengan pendanaan dari DIPA lembaga maupun dari DP2M Dikti dengan besaran dana Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-. Berdasarkan capaian yang diperoleh LPPM STKIP PGRI Sumenep dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja yang sangat membanggakan dan akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja LPPM kedepannya.

Dalam program penerapan IPTEKS bagi masyarakat ini diperlukan kepakaran yang mengetahui tentang berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi mitra. Berdasarkan analisis situasi yang ada, maka permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman akan urgensi pendidikan politik bagi kelompok pemilih

2. Pembagian tugas tim pelaksana kegiatan

Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengabdian pada masyarakat kelompok peternak, maka dilaksanakanlah pembagian tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pelaksana secara umum akan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan hasil pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pemilu bagi kalangan pemilih pemula
2. Anggota tim pelaksana sebagai anggota tim pelaksana yang memiliki keahlian dibidang kepemiluan akan bertanggung jawab memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu bagi pemilih pemula

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

A. Solusi yang Ditawarkan

Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dihitung selain hasil Pemilu adalah angka partisipasi pemilih di dalam penyelenggaraan Pemilu. Angka partisipasi pemilih, setidaknya akan menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam kontestasi suatu Pemilu. Jika ingin dilihat dari sisi lain, angka partisipasi pemilih ini juga akan menjelaskan kekuatan legitimasi dari orang yang terpilih melalui proses Pemilu yang dilakukan. Karena pada hakikatnya, proses Pemilu adalah bentuk penyerahan mandat dari pemilih kepada yang dipilih, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berangkat dari itu, tingkat partisipasi pemilih mestinya menjadi entitas penting yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan Pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi penting untuk diupayakan? Sebab tingginya angka partisipasi pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Partisipasi pemilih dalam Pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah Pemilu hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan.

Melihat kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih yang menjadi salah satu indikator sukses tidaknya pesta demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu, Tim KKN melihat penggalangan partisipasi masyarakat sebagai satu program kegiatan prioritas. Hal ini seperti yang tertuang dalam rencana strategis Pelaksanaan KKN. Upaya penggalangan partisipasi masyarakat dilakukan dengan berbagai strategi yang masing-masing mempunyai tujuan dan target masyarakat yang berbeda, upaya-upaya tersebut antara lain adalah (Arif rahman Hakim,2017):

1. Program Pendidikan pemilih
2. Pendampingan (Peningkatan Partisipasi pemilih)
3. Penyuluhan Pemilu berkelanjutan
4. Peningkatan Pemahaman pemuda tentang pemilu.

Pertama pendidikan pemilih

Pendidikan Politik dan Pemilu bagi Pemilih bertujuan sebagai proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Dengan kata lain pendidikan pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu atau potensial pemilih dalam Tentang waktu kemudian: kelompok sasaran pendidikan pemilih terbagi:

a) Kelompok pemilih strategis,

Kelompok pemilih ini dinilai strategis berdasar besaran posisinya dalam kelompok pemilih, dimana klaster ini mencakup: a. Prapemilih: kelompok usia yang belum termasuk kedalam kategori berhak memilih, namun dalam 3-5 tahun kedepan akan masuk dalam usia berhak untuk memili, b. Pemilih, c. Perempuan, d. Marjinal dan penyandang disabilitas, e. Agamawan.

b) Kelompok Rentan:

kelompok pemilih disejumlah daerah yang masih memiliki masalah berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, masalah-masalah dimaksud termasuk daerah dengan tingkat partisipasi rendah. Memiliki potensi

pelanggaran yang tinggi dan daerah yang rawan potensi konflik dan kekerasan terkait kegiatan Pemilu.

c) Kelompok Sasaran lain:

kelompok diluar pemilih strategis dan kelompok rentan yang dinilai mewakili kondisi dan karakteristik daerah tertentu. Contoh kegiatan bersama kelompok ini adalah, kegiatan sekolah demokrasi, komunitas pegiat Pemilu, relawan demokrasi, serta pelatihan untuk melatih bagi guru-guru sekolah menengah atas.

Peningkatan partisipasi

Tujuan yang kedua ini adalah demi meningkatkan keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan dan sesuai siklus Pemilu, baik masa sebelum Pemilu atau pasca pelaksanaan Pemilu (nugroho, 2010). Berbagai kegiatan yang dilakukan lebih khusus saat masuk ke periode Pemilu, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan pemilih selama masa tahapan Pemilu yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari Pemilu. Hal ini dilakukan agar meningkat partisipasi pemilih.

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum baik dalam bentuk sebagai pemilih maupun yang dipilih. Untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu perlu adanya informasi yang jelas mengenai pemilu tersebut (Firmanzah, 2010).

B. Target Luaran

Dengan dilaksanakannya program Pendidikan Politik dalam penyuluhan pemilu bagi para pemuda desa gadingsari, mereka memiliki tingkat kesadaran bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan umum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengontol suatu system pemerintahan dan untuk mengukur tinggi atau rendahnya system demokrasi di suatu Negara.

a) Pemanfaatan aktifitas sosial budaya

Salah satu ciri masyarakat indonesia adalah paguyuban atau melakukan kegiatan sosial secara bersama-sama atau berkelompok. Hal tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan sosial budaya masyarakat di berbagai daerah di indonesia. Tujuan dari kegiatan ini juga untuk menarik para pelaku seni

b) Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sasaran dari program ini adalah kelompok masyarakat yang terbagi dalam 5 (lima) segmen, diantaranya: 1. Pemilih Pemula, 2. Kelompok Agama, 3. Kelompok perempuan, 4. Penyandang disabilitas, 5. Kelompok pinggiran.

C. Indikator Ketercapaian

Pendidikan Politik dalam Penyuluhan ini sangat penting sekali guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu di 2024, sekaligus mengukur sejauh mana peranan pemuda dalam kontes demokrasi yang akan datang. maka dari itu penyuluhan dengan tema Optimalisasi Peran pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan

Pemilih pemula yang terdaftar dalam penyuluhan ini adalah pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun, para pemilih ini sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, para pemilih pemula mempunyai antusiasme tinggi, relatif dan rasional, harus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Dalam penyuluhan yang dilakukan kali ini ditemukan masih banyak pemilih pemula apatis terhadap pelaksanaan pesta demokrasi dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang membuat pemilih pemula tidak bersuara, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari-hari, dimana kuantitas pemilih pemula pada umumnya adalah pelajar dan pekerja, hal demikian yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau politik, oleh karena itu diharapkan pelaksanaan penyuluhan ini menjadi indikator naiknya tingkat partisipasi pemilih dari tahun 2019 ke tahun 2024 mendatang.

1. Para pemilih pemula Kabupaten Sumenep mampu memahami pentingnya pendidikan pemilihan umum,
2. Sehingga para pemuda memahami bahwa aktivitas kehidupan berbangsa dan Negara tidak bisa terlepas dari dinamika pemilu.
3. Setelah mengikuti pelaksanaan penyuluhan pemilu, para pemuda menjadi antusias untuk memberikan hak pilihnya dalam perhelatan pemilu yang akan datang. Mereka sadar bahwa semua warga negara memiliki hak pilih yang harus disalurkan sesuai dengan jalur yang sah sehingga dapat mewujudkan makna kekuasaan di tangan rakyat.

Setelah mengikuti penyuluhan tentang penyuluhan pemilu, pada pemilu yang akan datang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Sehingga target 85% - 90 % tersalurnya partisipasi pemilih. Melihat Antusiasme para peserta yang mengikuti penyuluhan Pemilu, ditargetkan ada peningkatan Pemilih pada Pemilu tahun 2024 Mendatang.

No	Pemilu	2019	2024
1	Sebelum Penyuluhan	75-79%	
2	Setelah Penyuluhan		85-90%

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah pemilih. Pemilih merupakan parameter utama atas suksesnya terselenggaranya pemilu, Pemilu dapat berjalan demokratis jika ada pemilih yang ikut serta dalam penyelenggaraan tersebut. Dalam penyelenggaraan pemilu peningkatan partisipasi pemilih menjadi indikator penting. Semakin meningkat jumlah partisipasi pemilih, semakin baik pula kualitas demokrasinegara ini.
2. Penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Gadingsasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemilih Pemula dalam menghadapi
3. Pemilu yang akan datang. Meningkatkan pemahaman tentang kepemiluan, mensoaliasasikan tentang pentingnya pelaksanaan Pemilu yang untuk lima tahun sekali.
4. Minimnya pemahaman pemilih pemula akan pentingnya keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu lebih digencarkan lagi berbagai macam sosialisasi atau penyuluhan oleh *stake holder* seperti (KPU, Relawan Demokrasi, Media, LSM, Mahasiswa) Penyuluhan seperti a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, b. jadwal dan program Pemilihan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan, hal ini bertujuan untuk mendorong meningkatkannya minat masyarakat khususnya pemilih pemula agar dapat berpartisipasi dalam pemilu untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya.

B. SARAN

Dengan adanya penyuluhan ini dapat meningkatkan antusiasisme hingga mencapai 80-90% pemilih pemula yang hadir disaat pelaksanaan pemilihan berlangsung. Penyuluhan ini sangat penting sekali guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu di 2024, sekaligus mengukur sejauh mana peranan pemuda dalam kontes demokrasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif rahman Hakim, P. d. (2017). Inovasi Pemilu, mengatasi, memanfaatkan peluang . Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Firmanzah. (2010). Persaingan, Legitimasi kekuasaan, dan Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuswati, Y. (2019). Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Karang Taruna Kecamatan Panyingkiran. PARAHITA ABDIMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat (Vol 1 No 1), 52-62.
- Labolo, M. (2017). Partai Politik dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teory, Konsep dan IsuStrategis). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Liando, D. M. (Vol 3 No 2 Oktober 2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum , 4.
- M. Taufik., M. (2007). Moralitas penegak Hukum, dan Advokat Profesi Sampah. Surabaya: JP Books.
- nugroho, w. (2010). pak beye dan politiknya. jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta: PT Rajawali.
- Setiawan, D. B. (2017). Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Umum, P. K. (2018). Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: KPU.
- Zainal Arifin Hoesein., A. (2017). Penetapan Sistem Pemilihan Umum. Depok: Rajawali Pers.